

STRATEGI DONALD TRUMP DALAM REORIENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

Timeria Zandrato

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama

Email : Timeriazdrato152@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bisa disebut mengidentifikasi beberapa kecenderungan perubahan orientasi kebijakan keamanan yang terjadi di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden Donald Trump terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Identifikasi tersebut diawali dengan penjelasan beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden-Presiden Amerika Serikat sebelumnya dalam upaya untuk menghentikan program pengembangan nuklir Korea Utara tetapi hal ini belum bisa terlaksana. Tulisan ini juga memprediksi kebijakan keamanan yang tepat dan efektif dalam upaya denuklirisasi semenanjung Korea. Kebijakan Trump diharapkan bisa menunjukkan urgensi yang lebih besar daripada kebijakan Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Berdasarkan asumsi tersebut, melalui strategi Maximum Pressure and Engagement Trump berupaya merubah arah kebijakan (reorientasi) terhadap kebijakan yang selama ini sudah dilakukan Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Dalam strategi tersebut, Trump mengkombinasikan antara strategi Hard Power Presiden Bush dan Soft Power Presiden Obama menjadi Smart Power. Kebijakan ini mengkombinasikan semua sarana dan solusi diplomatik, sanksi, pemotongan sumber ekonomi, penghentian pasokan pangan, diplomasi isolasi dan perundingan. Strategi ini diharapkan efektif untuk memaksa Pyongyang untuk memilih antara pengembangan senjata nuklir atau kelangsungan hidupnya sebagai sebuah negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Kebijakan Keamanan, Senjata Nuklir, Strategi *Maximum Pressure and Engagement*.

PENDAHULUAN

Isu keamanan di berbagai kawasan dunia yang belum terlihat solusi damainya menjadi keprihatinan masyarakat internasional, seperti yang kita tahu saat ini korea utara adalah sebuah negara yang memiliki senjata nuklir yang sebagai alat untuk mengancam negara-negara lain. Pengembangan senjata nuklir dimulai sejak Perang Dunia II yang akhirnya telah

menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Hingga pada akhirnya beberapa negara berlomba-lomba untuk mengembangkan nuklir. Senjata nuklir adalah senjata yang memiliki kekuatan dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat, sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Negara pemilik senjata nuklir adalah Amerika Korea Utara Senjata nuklir kini dapat dilancarkan melalui

berbagai cara, seperti melalui pesawat pembom, peluru kendali, peluru kendali balistik, dan Peluru kendali balistik jarak benua. Senjata nuklir bisa menjadi senjata pemusnah massal yang tentunya mengancam kestabilan keamanan dunia internasional. Sebagai salah satu negara pemilik nuklir, saat ini pengembangan nuklir, Korea Utara sedang dipantau oleh dunia internasional. Ancaman nuklir Korea Utara dikarenakan pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan uji coba senjata nuklir yang mengancam keamanan. Pengembangan nuklir yang terjadi di Korea Utara adalah dampak dari Perang Korea dan juga merupakan warisan dari Perang Dingin. Pengembangan nuklir Korea Utara mendapat kecaman dari berbagai negara dengan alasan, akan mengganggu keamanan dan kestabilan dunia International. Isu nuklir Korea Utara berarti kegiatan proyek Korea Utara untuk pengembangan senjata nuklir. Pembangunan reaktor nuklir pertama dan kedua Korea Utara dilakukan pada tahun 1965 dan 1970 dengan alasan hanya bertujuan untuk penelitian yang kemudian seiring berjalannya waktu hal tersebut meningkat menjadi isu nuklir yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan kestabilan kawasan serta internasional tentunya, karena pengembangan nuklir ini telah menjadi isu internasional. Pada tahun 1985 Korea Utara menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT). Pada awal tahun 90-an, kenyataan bahwa Korea Utara mengembangkan senjata nuklir terbongkar. Pada Januari 1992, Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib dengan IAEA.

Setelah beberapa kali pihak IAEA melakukan inspeksi terhadap Korea Utara, pihak Korea Utara menolak hasil inspeksi

IAEA yang menemukan beberapa kilogram plutonium untuk pembuatan senjata nuklir. Pada 13 Juni 1994, sebagai aksi protes terhadap hasil inspeksi IAEA, Korea Utara memutuskan untuk keluar dari keanggotaan IAEA dan di tahun yang sama Korea Utara juga memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian NPT sehingga menimbulkan isu nuklir Korea Utara. Hal ini tentu mengakibatkan Kecurigaan dunia terhadap percobaan pengembangan senjata nuklir Korea Utara semakin membesar. Kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Korea Utara yang sampe saat memiliki konflik yang belum menemukan titik terang dari penyelesaian masalah mereka, Pengembangan senjata nuklir merupakan permasalahan yang sangat penting bagi stabilitas keamanan kawasan selama dua dekade terakhir. Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang paling rentan akan bahaya nuklir. Permasalahan nuklir Korea Utara telah menjadi ancaman tidak hanya bagi keamanan negara-negara di kawasan Asia Timur saja, tetapi juga negara diluar kawasan tersebut. Amerika Serikat sebagai negara yang berpengaruh dalam geopolitik dan geostrategi global diharapkan bisa menerapkan kebijakan yang mempertahankan stabilitas keamanan kawasan Asia Timur.

Kebijakan kawasan Asia Timur akan menjadi salah satu kebijakan keamanan yang penting bagi Amerika Serikat dalam beberapa tahun kedepan. Tentu kebijakan ini akan secara hati-hati dirumuskan, dan sejauh mana perubahan yang akan terjadi pada kebijakan Amerika Serikat di bawah Trump apabila dibandingkan dengan strategi Poros Pasifik yang sudah dijalankan oleh Presiden Obama sebelumnya. Trump juga melontarkan pernyataan bahwa opsi militer akan memungkinkan untuk digunakan Amerika Serikat dalam menangani permasalahan nuklir Korea Utara. Hal ini tentu saja menimbulkan

perdebatan sengit. Jepang, Korea Selatan dan Cina tentu tidak menginginkan opsi penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara karena akan mengakibatkan perang di kawasan. Opsi militer juga pasti akan memberikan dampak luas tidak hanya di kawasan Asia Timur tetapi juga kawasan Asia secara umum. Dalam konteks ini, tentu akan sangat menarik untuk menganalisis berbagai kemungkinan strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Trump, apakah pilihan kebijakan militer akan menjadi kebijakan prioritas Amerika Serikat dan sejauh mana kebijakan tersebut menyimpang dari kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah dilakukan Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Terkait perilaku Korea Utara ini, sudah banyak para ahli yang membahas tentang topik tersebut. T. Roehrig misalnya, ia menjelaskan bahwa Korea Utara mengembangkan nuklir untuk mempertahankan keberlangsungan rezim Kim. Hal ini menjadi penting menurut Mun Suk Ahn karena adanya krisis ekonomi yang terjadi di Korea Utara disaat pemerintahan yang tidak stabil.

Di samping itu, Sung Chull Kim menjelaskan bahwa Korea Utara melihat peluang bahwa dengan mengembangkan nuklir dapat dimanfaatkan sebagai alat tawar dalam negosiasi demi memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan argumentasi ahli diatas, tulisan ini nantinya berupaya untuk menjelaskan perubahan perilaku Korea Utara dari segi persepsi Korea Utara terhadap identitas aktor di lingkungannya yang dianggap sebagai rival.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari informasi perubahan perilaku Korea Utara terkait mengembangkan senjata nuklir. Pada proses pengumpulan data dan informasi, tulisan ini menggumpulkan data

atau informasi yang berasal dari buku, artikel jurnal, berita, serta penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam menganalisis data dan informasi, tulisan ini menggunakan pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan oleh F. Kratochwill. Pendekatan ini menekankan bahwa aturan dan norma dapat menjadi landasan perilaku suatu aktor. Menurutnya, segala perilaku aktor dibentuk karena alasan tertentu proses pembelajaran dan interaksi antar-subjek yang dituntun oleh kepentingan, identitas, maksud, dan bahasa. Kedua proses tersebutlah yang menentukan apakah suatu negara memandang negara tertentu sebagai rival atau kawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Refleksi Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Era Clinton, Bush, dan Obama

Seperti yang kita tahu bahwa Selama lebih dari 25 tahun kebijakan keamanan Amerika Serikat dan pendekatan diplomatik yang telah dilakukan telah mengalami kegagalan dalam upaya untuk membujuk Korea Utara menghentikan program nuklirnya. Bahkan kita tahu bahwa Amerika Serikat selalu mengupayakan kesepakatan dengan rezim Korea Utara dalam rangka untuk menjaga kepentingannya di kawasan. Pada masa pemerintahan Bill Clinton, dan pada pada 21 Oktober 1994 Amerika Serikat Mencoba kembali untuk membujuk Korea Utara dengan *Geneva Agreed Framework* tetapi hal itu tidak berhasil. Kesepakatan ini menyatakan bahwa Korea Utara akan menonaktifkan reaktor nuklir dan sebagai konsekuensinya Amerika Serikat dan Korea Selatan akan menjamin kebutuhan energi dan menyediakan bahan bakar minyak untuk Korea Utara. Jepang dan Korea Selatan juga akhirnya menyatakan secara aktif ikut berpartisipasi dalam program ini, yang kemudian secara resmi berkembang

menjadi *Korea Peninsula Energy Organizations (KEDO)* pada tahun 1995.

Pada kenyataannya, *Geneva Agreed Framework* maupun KEDO bukanlah hanya kesepakatan untuk memberikan bantuan keuangan dan energi kepada Korea Utara, tetapi hal ini juga bertujuan politik untuk mencegah perkembangan senjata nuklir Korea Utara dan membuka dialog politik dengan rezim Korea Utara. KEDO dianggap Amerika Serikat tidak memberikan hasil yang efektif dalam upaya menghentikan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. dan Pada tanggal 17 April 1996, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengusulkan kembali diadakannya *Four Power Talks* antara Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan dan Korea Utara. Pertemuan empat pihak ini akhirnya berlangsung pada Desember 1997 di Jenewa. *Agreed Framework* yang disepakati tahun 1994 tidak lagi digunakan sebagai kerangka kerja utama terkait hubungan antara kedua negara dalam permasalahan nuklir. Pemerintahan Bush juga melakukan tinjauan ulang terhadap kebijakan pada masa pemerintahan Bill Clinton.

Ketika Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung, mengunjungi Washington pada Maret 2001, Presiden Bush menyatakan *sunshine policy* yang selama ini dilakukan oleh Korea Selatan sudah tidak efektif digunakan dalam menghadapi permasalahan nuklir Korea Utara. Korea Utara dinilai tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap kesepakatan dalam *sunshine policy*. Penilaian Amerika Serikat ini menjadi sebuah keputusan yang dilematis bagi Korea Selatan, yang selama ini menganggap *sunshine policy* sebagai sebuah kebijakan non-militer yang efektif dalam menghadapi rezim Korea Utara. Di sisi yang lain, segala kebijakan Korea Selatan terkait permasalahan nuklir Korea Utara juga harus mendapat dukungan dari Amerika Serikat.

Pemerintah Bush kemudian mengadopsi pendekatan yang sangat berbeda dan cenderung sulit untuk kembali diterapkan, yaitu dengan intens melakukan tekanan terhadap Korea Utara dan mengkategorikannya sebagai bagian dari “negara poros setan”.

Selain itu, semasa pemerintahan George W. Bush, Amerika Serikat juga terlibat aktif sejak tahun 2003 dalam *Six Party Talks*, yang dalam perjalanannya juga tidak memberikan hasil yang efektif dalam upaya denuklirisasi Semenanjung Korea. Pada tahun 2008, pemerintahan Obama kemudian melakukan pendekatan yang berbeda dengan yang dilakukan presiden Amerika Serikat sebelumnya yaitu melalui pendekatan smart power dalam strategi Poros Pasifik (*Pivot Pacific*), pendekatan dengan tetap melakukan tekanan namun disisi lain memberikan peluang bagi perundingan negosiasi nuklir untuk Korea Utara, namun hasilnya kemudian tidak lebih baik dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Korea Utara masih enggan dalam menghentikan kemampuan nuklirnya dan kemudian melakukan empat kali uji coba nuklir di bawah pemerintahan Obama (tahun 2009, 2013, dan dua uji coba terjadi di awal tahun 2017). Kita mungkin tidak setuju dan melakukan perdebatan mengenai pendekatan apa yang tepat untuk dilakukan, tetapi fakta yang terjadi, semua strategi yang sudah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat terkait dengan program nuklir Korea Utara sejak Perang Dingin sampai kini terbukti tidak efektif sama sekali.

Amerika Serikat, Cina dan Aliansi Trilateral

Dalam penyusunan kebijakan keamanan di kawasan Asia Timur, Amerika Serikat selalu mempertimbangan keikutsertaan dan kerja sama strategis antara Amerika

Serikat, Korea Selatan dan Jepang. Permasalahan Semenanjung Korea dianggap sebagai permasalahan penting dan paling mengancam bagi keamanan dan kepentingan negara-negara tersebut. Keterlibatan aktif Cina juga diharapkan bisa memberikan dampak positif, akan tetapi pada kenyataannya Cina selalu memiliki peran ganda. Beijing mendapati dirinya terperangkap dalam dilema kepentingan strategis dalam mencegah nuklir Korea Utara. Karena itulah, Beijing mendukung sanksi yang diberikan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara namun di sisi lain, Beijing juga tetap melakukan kendali terhadap rezim Korea Utara.

Persepsi Cina terhadap permasalahan Korea Utara terkesan sangat apatis. Bahkan Cina tidak memberi indikasi kuat bahwa pihaknya bersedia untuk mengurus masalah keamanan Pyongyang. Disisi yang lain, ketakutan Cina apabila rezim Kim runtuh, akan mengirim jutaan pengungsi Korea Utara ke Cina. Ini adalah sesuatu yang secara tegas tidak diinginkan oleh Beijing. Setiap perubahan di Semenanjung Korea, dapat menyebabkan masalah bagi pemerintah Cina. Ditambah lagi, jika Amerika Serikat memenangkan perang dengan Korea Utara, maka negosiasi penyatuan kembali Semenanjung Korea akan sangat mungkin terjadi. Itu tidak hanya secara politis buruk bagi kepentingan Cina, tapi juga dari sisi keamanan akan sangat berpengaruh, khususnya keamanan perbatasan Cina dan Korea Utara.

Hal ini tentunya membuat Cina sulit untuk menemukan jalan keluar yang efektif. Cina dalam beberapa tahun kedepan akan memanfaatkan nuklir korea utara sebagai diplomasi sensitif untuk menekankan kepentingannya Amerika Serikat di kawasan. Masa depan kedua kekuasaan negara ini bergantung pada pertumbuhan ekonomi

mereka masing-masing dan hasilnya Cina memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh meningkat dari yang di perkirakan. Walaupun kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan negara adidaya tunggal tapi kita tidak dapat meremehkan keberadaan Cina, kemunculan Cina akan mengubah konstelasi global kedepannya dan tentunya Cina diharapkan memiliki peran yang penting. Posisi strategis dan kepemimpinan Cina dalam kawasan Eurasia melalui kebijakan OBOR ini jelas akan memberikan implikasi yang besar bagi hubungan keamanan Amerika Serikat dengan Cina dalam beberapa tahun kedepan. Hubungan ekonomi yang harmonis antara Amerika Serikat dengan Cina akan mempengaruhi kemakmuran jangka panjang masyarakat internasional.

Meski demikian, hambatan dalam hubungan kedua negara ini akan tetap ada dan tidak akan menghilang secara otomatis. Asumsi ini akan diyakini akan tetap bertahan serta membuat Cina dan Amerika Serikat berada dalam hubungan yang kompleks dan penuh dengan kontradiksi. Selain terhadap Cina, kebijakan keamanan Amerika Serikat memiliki potensi untuk mempengaruhi beberapa kekuatan Asia Timur lainnya, termasuk sekutu Amerika Serikat di kawasan. Banyak reaksi negatif terhadap saran yang diberikan Trump bahwa Jepang dan Korea Selatan agar mempertimbangkan untuk memiliki senjata nuklir. Selain itu, Trump juga akan melakukan reorientasi kebijakan tentang kehadiran personil militer Amerika Serikat di kawasan. Jepang dan Korea Selatan yang secara khusus dianggap oleh Trump sebagai negara yang terlalu mengandalkan Amerika Serikat. Selain permasalahan hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Timur, sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Korea Utara terhadap Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri Korea Utara terhadap Amerika Serikat telah dibentuk oleh pengalaman pahit sejak Perang Korea dan persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Korea Utara menilai Amerika Serikat telah menggagalkan upaya Kim Il Sung untuk menyatukan Korea Selatan dengan Korea Utara melalui agresi militer pada masa Perang Korea. Selain itu, selama Perang Korea berlangsung, Korea Utara merupakan pihak yang selalu mengalami tekanan politik dan militer dari Amerika Serikat akibat kemampuan militer yang tidak seimbang antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, penggunaan nuklir sebagai strategi keamanan nasional merupakan alasan yang mendasari Korea Utara mengingat faktor sejarah yang menggambarkan adanya ancaman dan dominasi dari Amerika Serikat. Dalam menghadapi Korea Utara Amerika Serikat memiliki opsi untuk menggunakan jalur diplomasi dan opsi militer. Apabila dipilih instrumen diplomasi, akan muncul dua kesulitan. Pertama, format perundingan. Amerika Serikat dan Korea Utara masih belum bersepakat apakah perundingan bersifat bilateral, multilateral, atau perundingan kawasan. Kedua, substansi perundingan. Mereka berbeda pandangan apakah perundingan bersifat komprehensif atau parsial. Amerika Serikat pada dasarnya menginginkan pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat diverifikasi dan kemudian disepakati melalui perundingan multilateral. Sebagai timbal balik, Amerika Serikat dan sekutunya bersedia memberikan bantuan ekonomi. Amerika Serikat mendesak Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya, baru kemudian konsensi ekonomi diberikan.

Pola seperti ini pernah dijalankan pada masa pemerintahan Clinton, namun sulit untuk diimplementasikan secara efektif karena tidak

adanya kepercayaan yang kuat antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Korea Utara adalah negara kecil yang memiliki kecemasan yang kuat terhadap negara-negara lain, Korea Utara takut jika mereka menghentikan persenjataan nuklir maka negar-negara yang ingin mengincar kekuasaan di Korea utara akan sangat mudah untuk menyerang hal itu yang membuat Korea Utara tidak ingin melepaskan atau menghentikan persenjataan nuklir mereka.

Donald Trump dan Reorientasi Kebijakan Keamanan Amerika Serikat

Menemukan cara untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara bukanlah hal yang mudah. Perdebatan panjang untuk menghentikan program nuklir Korea Utara telah dilakukan dalam upaya mencapai stabilisasi keamanan Semenanjung Korea. Pada prinsipnya, Trump mempunyai lima opsi strategis dalam menghentikan program nuklir Korea Utara. Pertama, Trump hanya bersikap pasif dan mengikuti strategi yang sudah dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya dan hanya menunggu respon dari Korea Utara untuk saling bersepakat dalam perjanjian denuklirisasi. Mengingat kepentingan yang terus muncul akibat ambisi nuklir Korea Utara, pilihan ini tampaknya tidak menjanjikan banyak keuntungan bagi Amerika Serikat. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan banyak pengamat sebelumnya, saat Kim Jong-un menggantikan Kim Jong-ill, pemimpin Korea Utara itu kini telah berhasil mengkonsolidasikan posisinya dan pemerintahannya lebih stabil daripada rezim sebelumnya.

Opsi kedua, Amerika Serikat menerapkan tindakan represif. Amerika Serikat dapat menekan rezim Korea Utara dengan tindakan non-militer, yakni dengan

menggunakan sanksi, tekanan dan kebijakan isolasi yang dirancang untuk memberikan dampak yang lebih besar daripada yang selama ini sudah dilakukan kepada Korea Utara. Memperketat sanksi mungkin menjadi pilihan yang rasional, meski juga pilihan ini dianggap masih tidak menjanjikan hasil yang efektif, apabila tidak mengidentifikasi langsung sumber masalah nuklir Korea Utara.

Opsi yang ketiga adalah mendorong Cina untuk memberikan tekanan ekonomi dan desakan politik kepada Korea Utara. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat harus terus menekan Cina untuk memanfaatkan kekuatan ekonominya atas Korea Utara sebagai tekanan untuk menyelesaikan permasalahan nuklir. Ketergantungan ekonomi Korea Utara terhadap Cina bisa menjadi kunci atas permasalahan nuklir. Pemerintahan Clinton, Bush dan Obama juga telah memahami kondisi ini, dan mereka berusaha melibatkan Beijing untuk terus berperan lebih aktif dalam kasus nuklir Korea Utara. Opsi keempat yang bisa dilakukan Amerika Serikat adalah menggunakan instrumen militer untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara oleh rezim Korea Utara. Pendekatan ini menggunakan cara-cara ancaman secara langsung dan bertujuan untuk mengganti rezim Korea Utara. Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa aksi militer melawan rezim Korea Utara dan program senjata nuklirnya sebagai skenario yang layak dilakukan oleh Amerika Serikat.

Meskipun penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara membawa risiko terjadinya perang. Perang akan menciptakan instabilitas keamanan, sosial, politik dan ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan saja tetapi juga negara-negara disekitar kawasan. Perang bisa memberikan dampak yang besar terhadap pasar uang dan aliran modal sehingga bisa

memicu krisis ekonomi kawasan. Selain itu, opsi serangan militer pasti akan mengundang reaksi keras dari Cina yang tentu akan menyulitkan Amerika Serikat. Cina telah menjadi pesaing kuat bagi Amerika Serikat dan kini juga mulai berkembang menjadi negara adidaya baru, dan sebagaimana lazimnya negara adidaya, Cina juga akan bersikap tegas terhadap berbagai persoalan internasional khususnya yang terkait dengan keamanan. Mencoba opsi perundingan langsung dengan Pyongyang menjadi opsi kelima bagi pemerintahan Amerika Serikat. Trump telah mengumumkan niatnya untuk tidak menggunakan kembali strategi yang sudah digunakan presiden Amerika Serikat sebelumnya. Trump mengatakan, dia akan berbicara secara langsung dan membujuk pimpinan Korea Utara, Kim Jong-un, untuk menghentikan program nuklirnya. Jika Korea Utara kembali ke meja perundingan dan membuat konsesi bersama, Amerika Serikat harus mengatasi defisit keamanan rezim Korea Utara saat ini.

Salah satu kemungkinan untuk melakukannya adalah dengan memenuhi permintaan Pyongyang untuk saling melaksanakan perjanjian damai di Semenanjung Korea. Tanpa diragukan lagi, kesimpulan dari kesepakatan ini akan menjadi perkembangan yang baik di kawasan, mengakhiri sikap bermusuhan negara pasti akan memperbaiki situasi kawasan secara keseluruhan. Berkenaan dengan isu nuklir, perjanjian damai tampaknya merupakan satu-satunya pilihan yang tepat bagi Amerika Serikat untuk mengatasi defisit keamanan rezim Korea Utara sebagai motif dasar program senjata nuklir dengan jaminan keamanan formal. Pyongyang telah mengumumkan kesediaannya untuk menghentikan pengujian nuklir jika Amerika Serikat menyetujui langkah ini.

Mengingat kurangnya alternatif yang menjanjikan, Washington harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kelima pendekatan tersebut pada dasarnya sudah pernah dilakukan oleh presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pada masa era Clinton, Bush dan Obama strategi dan pendekatan Amerika Serikat terhadap Korea Utara bersifat parsial. Artinya, antar satu kebijakan dengan kebijakan lainnya saling bertentangan dan tidak koheren. Padahal antar kebijakan dalam satu strategi seharusnya saling mendukung sehingga tercapai hasil akhir yang efektif. Pada masa pemerintahan Clinton, kemajuan signifikan pernah hampir dicapai Amerika Serikat. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine K Albright ke Pyongyang pada November 2000 memungkinkan adanya kesepakatan rudal secara permanen disetujui jika Presiden Amerika Serikat melakukan kunjungan dan negosiasi langsung di Korea Utara.

Ketika Presiden Clinton mendekati akhir masa jabatannya, waktu untuk mempersiapkan kunjungan tersebut menjadi semakin singkat. Sebaliknya, Korea Utara menegaskan bahwa kesepakatan rudal antara Amerika Serikat dan Korea Utara hanya dapat dicapai apabila Presiden Amerika Serikat melakukan kunjungan langsung ke Pyongyang. Namun pada akhirnya, Amerika Serikat memutuskan untuk tidak mengambil risiko dalam kunjungan presiden tersebut. Kecurigaan ini pada akhirnya semakin menyulitkan diplomasi dan upaya negosiasi Amerika Serikat pada masa-masa selanjutnya. Tidak hanya itu saja dengan pemerintahan Bush hal itu pun terjadi lagi. Pada pertemuan putaran keempat perjanjian *Six Party Talks* yang dilaksanakan pada September 2005, terdapat beberapa perubahan positif yang idealnya terjadi pada proses denuklirisasi di Semenanjung Korea. Pertemuan tersebut

menghasilkan kesepakatan bahwa Korea Utara setuju untuk menghentikan program nuklirnya dan kembali pada perjanjian non-proliferasi nuklir. Sebagai kompensasi atas kesepakatan tersebut, kelima negara lain dalam *Six Party Talks* akan menjamin keamanan serta normalisasi hubungan ekonomi dengan Korea Utara.

Perjanjian ini telah membawa kesepakatan dan optimisme baru bagi hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat. Namun pada akhirnya, Amerika Serikat tetap memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Hal ini membuat Korea Utara meragukan komitmen negara-negara dalam *Six Party Talks* dan memutuskan untuk tetap melaksanakan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006. Sedangkan pada era Obama, Amerika Serikat dinilai terlalu lembut dan cenderung pasif serta terlalu banyak berharap pada Cina untuk ikut serta secara bersama-sama menekan Pyongyang. Upaya ini pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang tidak efektif. Obama terlalu fokus ke Cina dan mengabaikan Korea Utara pada tahun 2013 Obama mencoba melakukan kesepakatan melalui "*Strategic Patience*" tapi tentunya hasilnya sama tidak berhasil sama sekali, melihat keadaan ini Trump mencoba kepemimpinan yang berbeda dia lebih menekankan Pada awal tahun 2017, pemerintahan Trump mencoba melakukan pendekatan militer-centris dengan mengimplementasikan kebijakan keamanan yang menggunakan strategi kerjasama bilateral dan unilateral serta secara langsung menuntut biaya terhadap negara aliansinya atas kontribusi keamanan dari Amerika Serikat. Paradigma dan keyakinan Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat mengabaikan keamanan sendiri dari ancaman eksternal jika mendukung keamanan negara lain. Kunci dasar kebijakan luar negeri ini adalah kalimat "*Make America Great Again*" dan "*America*

First” yang menggaris bawahi kenyataan bahwa Amerika Serikat akan memperkuat kembali kekuatannya dalam bidang pertahanan dan kepentingan Amerika Serikat akan selalu menjadi prioritas utama. hal ini menyebabkan pergeseran gerak postur kawasan Asia Timur.

Ketika Korea Utara kembali melakukan berbagai uji coba rudal kendali dan secara langsung mengancam akan melakukan serangan atas markas militer Amerika Serikat di Guam pada pertengahan 2017. Hal ini kemudian menjadi sorotan bagi kegagalan Amerika Serikat untuk menghentikan ancaman keamanan dari Korea Utara, beberapa pengamat berpendapat bahwa tidak realistis bagi Amerika Serikat untuk berkompromi dengan Korea Utara tapi melihat bahaya yang dapat di sebabkan oleh nuklir masalah ini tidak bisa untuk di abaikan juga Trump mengatakan bahwa dia memiliki tugas baru untuk mengatasi nuklir ini dari duluh tidak memiliki dialog Selama ini hampir tidak ada prospek bahwa diplomasi, dialog, kerja sama, dan tekanan konvensional lainnya dapat meyakinkan Korea Utara untuk mengakhiri program senjata nuklirnya. Dialog bilateral, trilateral, multilateral dan resolusi Dewan Keamanan PBB, ditambah dengan sanksi ekonomi dan diplomatik, belum berjalan efektif untuk menghentikan ketegangan di kawasan Asia Timur akibat dari perkembangan nuklir Korea Utara.

Dengan demikian mencoba hal baru dengan harapan yang lebih baik tapi jika strategi ini tidak berhasil maka Trump hasil memaksa Korea Utara melakukan perundingan kembali di meja denuklialisasi guna untuk mencapai kesepakatan yang sama. Melihat keadaan yang semakin Genting tentang permasalahan nuklir Trump mengubah strategi untuk bisa menghentikan senjata nuklir Korea Utara bahkan Donald Trump tidak peduli dengan cara apapun selama itu bisa membuat

Korea Utara bersedia meninggalkan program nuklir. beralih ke pendekatan matimu *pressure an agreement* pendekatan ini menggabungkan antara retorika diplomatik, peningkatan sanksi, dan perundingan. dengan strategi Donald Trump berharap Korea Utara bisa menghentikan program nuklir karena karena di sini Korea Utara harus bisa memilih antara mengembangkan senjata nuklir atau kelangsungan hidup sebuah negara Kim jong-un merasa berada merasa bahwa rezimnya terancam dan dia akan mempertimbangkan kembali opsi yang diberikan Amerika Serikat tujuan awal dari strategi yang dibuat Amerika Serikat ini adalah guna menyadarkan Korea Utara bahwa sangat berbahaya memiliki senjata nuklir ini Amerika Serikat sengaja menekan tentang rezim Kim jong-un guna untuk membuat Korea Utara bisa meninggalkan program nuklirnya Dalam strategi ini Amerika Serikat harus berusaha agar negara-negara yang melakukan kerjasama dengan Korea Utara seperti negara Jepang Cina Korea Selatan dan lain-lainnya harus berhenti melakukan kerjasama dengan korea utara memang hal ini sangat beresiko untuk Amerika Serikat sendiri tetapi lebih beresiko jika senjata nuklir Korea Utara itu akan diluncurkan Amerika Serikat secara khusus ingin menghapus Korea Utara dari daftar Blacklist agar Korea Utara bisa bergabung dengan insitusi keuangan internasional guna membangkitkan ekonomi negaranya tetapi mengingat program nuklir di Korea Utara Amerika Serikat tidak melakukannya, strategi ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya jadi sangat sulit untuk memprediksi Apakah strategi ini akan berhasil atau tidak dan Donald Trump berharap bahwa korea utara bisa melakukannya mengingat Terbatasnya sumber daya yang dimiliki membuat Korea Utara sulit untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Korea Utara terisolasi dari sistem internasional karena kebijakan rezim otoriternya yang melarang segala bentuk komunikasi dengan pihak luar. Hal ini kemudian diperparah dengan bencana alam dan kelaparan yang melanda negara tersebut. Rakyat Korea Utara hidup dengan banyaknya bantuan baik dari Cina, Rusia, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Bantuan-bantuan tersebut tidak hanya berupa pangan, tetapi juga energi, khususnya minyak. Walaupun kondisi ekonominya sangat memprihatinkan dan sering mendapat bantuan dari dunia internasional, Korea Utara tampaknya akan tetap mengejar kepentingan nasionalnya untuk mencapai tujuan negara dengan ideologi yang telah ditentukan. Bagi Korea Utara, negosiasi terhadap program pengembangan senjata nuklir tidak akan berjalan efektif selama sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Korea Utara tetap dilaksanakan.

Dalam pemerintahan Donald Trump saat ini mengenai sengketa yang terjadi antara AS dengan Korea Utara menjadi hal yang menarik untuk dibahas yang dimana kita tau sejak dulu presiden-presiden sebelum Donald Trump sudah membuat berbagai strategi dalam mengatasi tentang senjata nuklir Korea Utara ini tetapi tidak membawakan hasil seperti yang diinginkan dan saat Donald Trump menjadi seorang presiden banyak strategi-strategi yang tidak dijalankan dia kembali seperti yang dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Trump beranggapan bahwa strategi yang dilakukan presiden-presiden dalam membuat kebijakan sebelumnya kurang efektif, sehingga perubahan strategi Trump dalam membuat kebijakan berubah. Perubahan kebijakan keamanan tentang senjata nuklir oleh AS dibawah kepemimpinan Trump diharapkan bisa menyelesaikan persengketaan yang ada saat ini, Trump yang menggunakan

strategi maximum pressure dan engagement dalam mengubah kebijakan yang dulu pernah ada, Trump yang menggunakan strategi dengan menggabungkan atau mengkombinasi antara strategi Hard Power yang dulu digunakan presiden Bush dan *Soft Power* yang digunakan presiden Obama menjadi *Smart Power*.

Smart Power yang merupakan strategi yang digunakan Trump membuat sebuah kebijakan yaitu mengkombinasi semua sarana dan *social diplomatic*, sanksi, pemotongan sumber ekonomi, penghasilan pasokan pangan, diplomasi isolasi dan perundingan. Kebijakan yang dilakukan ini diharapkan dapat menekan Negara Korea Utara untuk berhenti mempertahankan senjata nuklir yang mereka kembangkan saat ini karna dengan kebijakan yang dilakukan Trump saat ini Negara Korea Utara (Pyongyang) dipaksa untuk memilih antara pengembangan senjata nuklir atau kelangsungan hidup sebuah Negara. Korea Utara yang menjadikan nuklir sebagai senjata utama mereka dalam melindungi Negara mereka dari Negara-negara yang ingin menyerang Korea Utara hal ini tentunya menjadi alasan utama mengapa mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengembangkan nuklir, tetapi dibalik pengembangan senjata nuklir dengan alasan utama sebagai pelindung Negara banyak Negara-negara lain yang merasa takut juga karna jika senjata nuklir diluncurkan maka kerusakan besar akan terjadi bahkan bisa dikatakan jika nuklir diluncurkan bisa membuat satu Negara hancur seketika. Mengingat hal itu makanya Negara-negara lain mengklaim bahwa senjata nuklir ini mengancam keamanan stabilitas dunia internasional.

Apalagi saat ini senjata nuklir yang dibuat oleh Korea Utara sudah bisa diluncurkan dengan berbagai cara seperti pesawat pemboman, peluru kendali, peluru

kendali balistik dan kendali balistik jarak benua. Hal ini tentunya membuat AS merasakan ketakutan yang lebih karena jika Korea Utara merasa terancam atas tindakan yang dilakukan oleh AS maka Korea Utara tidak akan tinggal diam maka hal yang akan terjadi adalah sebuah peperangan, maka dari itu Trump harus bisa mengambil strategi yang baik untuk membuat kebijakan yang sempurna supaya Negara dan masyarakatnya tetap merasa aman dari ancaman Korea Utara.

SIMPULAN

Korea Utara merasa bahwa ketidak hadirannya Amerika Serikat dalam upaya denuklirisasi Korea Utara akan menjadi Preseden bahwa Amerika Serikat dianggap menyetujui apa yang telah dilakukan Korea Utara sebagai pemilik nuklir. bagaimana Donald Trump dalam menyelesaikan tentang masalah ini akan menjadi strategi umum dalam pengembangan keamanan Amerika Serikat, Donald Trump harus bisa mengubah kebijakan strategi secara drastis mengingat kegagalan-kegagalan yang telah dialami dilewati Amerika Serikat dalam mencegah Korea Utara dalam program nuklir di masa lalu kebijakan Amerika Serikat tidak konkrit dengan strategi utama yang telah ditetapkan sehingga tidak efektif. sehingga tidak bisa mendukung dan hal ini berakibat ke arah kegagalan karena banyaknya kerjasama yang telah disepakati tapi tidak bisa terlaksana kerana dianggap kurang efektif dan Donald Trump membuat strategi *maximum pressure an agreement* berharap dapat mengubah arah kebijakan yang baik strategi yang telah dilakukan oleh presiden-Presiden Amerika sebelumnya Donald Trump mencoba strategi kombinasi antara hard power Presiden bush dan *soft power* presiden Obama menjadi kebijakan *smart power* dengan strategi yang dibuat Donald Trump ini diharapkan bisa

memberikan solusi karena Strategi ini berupaya untuk mengkombinasikan solusi diplomatik dan sanksi dengan tindakan ekstrim dalam pemotongan ekonomi penghentian pasokan pangan dan diplomasi isolasi. Bahkan, penggunaan instrumen militer juga sangat mungkin untuk dilakukan dalam memaksa Pyongyang menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya. Apabila pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat dibawah Trump, tidak berbeda dan lebih baik dengan yang selama ini sudah diterapkan, maka bisa dipastikan terdapat dua kemungkinan yang realistis. Korea Utara menjadi menjadi negara dengan kemampuan persenjataan nuklir yang stabil atau perang konvensional berskala besar terjadi di Semenanjung Korea.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, C.K., 2006, US-North Korean Relations, dalam J. Feffer (ed.), *The Future of US-Korean Relations*, Routledge, London.
- BBC Indonesia. 2017. Presiden Trump Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Korea Utara. BBC Indonesia. Diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41341015> pada 28 Oktober 2017.
- Courmont, B., 2016. "Trump's Foreign Policy: Implications for Europe and East Asia, Iris Institut De Relations Internationales Et Strategiques.
- Hanson, M., 2007, Nuclear Weapons in the Asia Pacific: A Critical Security Appraisal. In Burke, A. & McDonald, M (eds.), *Critical Security in the Asia Pacific*. Manchester University Press, Manchester.
- Hayes, P. & Moon, C. 2016. *The North Korean Nuclear Multilemma: Options to Break the Nuclear Deadlock in Northeast Asia*, Institute of Korean Studies, vol. 47, no. 4.

- Holland, A. 2017. China's One Belt, One Road: An Ambitious Strategy Challenging the U.S. American Security Project. Diakses dari <https://www.americansecurityproject.org/chinas-one-belt-one-road-an-ambitious-strategy-challenging-the-u-s/> pada 25 Oktober 2017.
- Makela, M. 2016. Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views. The New York Times. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html?mcubz=1> pada 29 April 2016.
- Max Fisher, 2016. „What Is Donald Trump's Foreign Policy?, The New York Times, <http://www.nytimes.com/2016/11/12/world/whatis-donald-trumps-foreign-policy.html> diakses pada 11 November 2016.
- Pollack, J. D., 2017, Donald Trump and the Future of U.S. Leadership: Some Observations on International Order, East Asia, and the Korean Peninsula.
- Sriyono, A.A., 2004, Korea Utara: Antara Diplomasi dan Perang, dalam A.A. Sriyono, dkk, (ed) Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sturm, P. 2017. Opinion: Unlike Donald Trump, North Korea has a plan. Deutsche Welle. Diakses dari <http://www.dw.com/en/opinion-unlike-donald-trump-north-korea-has-a-plan/a-40059106> pada 23 Oktober 2017.
- Straub, D. 2016. North Korea Policy: Recommendations for The Trump Administration. Academic Paper Series. Korea Economic Institute of America.
- The New York Times, 2016. "Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views", <https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html?mcubz=1> di akses pada 29 April 2016.
- Wirengjurit, D., 2002, Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir: Pengertian, Sejarah, dan Perkembangannya, Alumni, Bandung.
- Yuliantoro, N. Rachmat., 2012, Menuju Kekuatan Utama Dunia: Sekilas Politik Luar Negeri Cina, Institute of International Studies, Yogyakarta.
- E.J.R. Revere, 2016. Brookings, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/07/10/the-trump-administrations-north-korea-policy-headed-for-success-or-failure/> diakses pada 15 September 2016.